

***Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia**

Naufal Muhammad Fajari Abrar<sup>1)</sup>, Nelly Masnila<sup>2)</sup>, Yevi Dwitayanti<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya  
<sup>1,2,3)</sup>[naufalemfa@gmail.com](mailto:naufalemfa@gmail.com) ; [nellymasnila@polsri.ac.id](mailto:nellymasnila@polsri.ac.id) ; [yevidwitayanti@gmail.com](mailto:yevidwitayanti@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Examining how the Flypaper Effect, the General Allocation Fund, the Revenue Sharing Fund, and Regional Original Income affect regional expenditure in Indonesian provinces was the primary goal of this study. The researchers in this study used purposive sampling to choose 22 out of 38 provinces in Indonesia for their investigation. The research included the years 2019 through 2022. The investigation's secondary data sources were compiled using the documentation technique. Data from the "Provincial Government Financial Report Audit Results" is specifically referenced in the budget realization report. For further information, see the official website at <http://e-ppid.bpk.go.id>. The multiple regression analysis method employed in this research is IBM SPSS 26. General allocation, revenue sharing, and regional original income all have a role in shaping regional spending, according to the research. Lower coefficients are associated with local revenue compared to the General Allocation Fund and Revenue Sharing Fund. Finally, the Flypaper Effect has an impact on the provincial governments of Indonesia.*

**ABSTRAK**

Mengkaji bagaimana Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi belanja daerah di provinsi-provinsi di Indonesia adalah tujuan utama dari penelitian ini. Para peneliti dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk memilih 22 dari 38 provinsi di Indonesia untuk diteliti. Penelitian ini mencakup tahun 2019 hingga 2022. Sumber data sekunder penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data dari "Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi" secara khusus dirujuk pada laporan realisasi anggaran. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat di situs resmi <http://e-ppid.bpk.go.id>. Metode analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah IBM SPSS 26. Alokasi umum, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah memiliki peran dalam membentuk belanja daerah, menurut penelitian ini. Koefisien yang lebih rendah dikaitkan dengan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Terakhir, Flypaper Effect berdampak pada pemerintah provinsi di Indonesia.

**Kata kunci:** *Belanja Daerah, Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah*

**1. PENDAHULUAN**

Undang-undang No. 32 tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 tahun 1999) mendesentralisasikan kekuasaan dari pemerintah federal ke negara bagian dan teritori. Pemerintah daerah membutuhkan alokasi keuangan yang besar untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah. Sebagai hasilnya, pemerintah federal mengesahkan UU No. 33/2004, yang menetapkan keseimbangan fiskal antara federal dan negara bagian. Indonesia memperkuat ekonomi dalam negerinya terhadap globalisasi ekonomi dengan menganjurkan desentralisasi dan otonomi daerah. Alih-alih bergantung pada kapasitas daerah untuk mengumpulkan pajak, negara-negara berkembang umumnya memberikan anggaran berimbang untuk membantu pengeluaran daerah (Nurdini et al., 2015). Pendapatan asli daerah hanya dapat menutupi hingga 20% dari keseluruhan pengeluaran, menurut Kuncoro (2007). Dengan demikian, dana perimbangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan uang tunai yang diperlukan untuk membayar layanan-layanan dasar.

Belanja daerah didefinisikan oleh UU No. 33/2004 sebagai semua pengeluaran daerah yang nilainya berkurang dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah yang bersangkutan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dana untuk belanja daerah dapat diperoleh dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Fenomena yang disebut dengan "flypaper effect" terjadi ketika dana perimbangan belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan asli daerah. Menurut Amalia dkk. (2015), "flypaper effect" terjadi ketika belanja daerah lebih banyak dibiayai oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerah.

"Money Sticks Where It Hits" pertama kali dikemukakan oleh Arthur Okun pada tahun 1930 (Agussalim et al., 2022), dan pertama kali didefinisikan pada tahun 1979 oleh Courant, Ramlich, dan Rubinfeld. "Flypaper effect" mengacu pada tren pemerintah daerah yang semakin mengandalkan hibah dan bentuk pendanaan federal lainnya untuk mendanai pengeluaran mereka.

Untuk membantu operasional dan pelayanan masyarakat, pemerintah federal memberikan dana kepada pemerintah daerah melalui DAU. Dampaknya yang besar terhadap belanja daerah ditunjukkan oleh Solikin (2017). Namun, temuannya menunjukkan bahwa DAU tidak berdampak signifikan terhadap belanja daerah (Adiputra, 2017).

Bagian penting dari desentralisasi adalah distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah berdasarkan persentase yang tetap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat sedikit pengaruh DBH terhadap belanja daerah, demikian menurut Melda dan Syofyan (2020). Sebaliknya, menurut (Armawaddin et al., 2018), DBH sangat berpengaruh terhadap belanja daerah.

Pemerintah daerah mendapatkan PAD sebagai hasil dari pajak yang dikenakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dikontrol oleh negara bagian atau pemerintah federal. Amalia dan Wahyudin (2015) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Aprilia dan Saputra (2013) menemukan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah terbukti dipengaruhi oleh flypaper (Salawali et al., 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Agussalim dkk. (2022) di Provinsi Sulawesi Selatan menemukan bahwa belanja daerah berkorelasi positif dengan PAD, tetapi tidak ada pengaruh yang nyata antara provinsi dan DAU terhadap belanja daerah. Dampak flypaper pada belanja daerah adalah apa yang ditemukan dalam penelitian ini untuk DAU. Dengan menggunakan hasil penelitian sebelumnya yang berfokus pada kabupaten dan kota sebagai titik awal, para peneliti mulai mempelajari flypaper effect di seluruh provinsi di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### *Agency Theory*

Dengan menggunakan ide bahwa agen termotivasi untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri, Jensen dan Meckling (1976) mempresentasikan sebuah teori keagenan yang mengklarifikasi dinamika hubungan antara prinsipal (pihak yang memberikan mandat) dan agen (pihak yang menerima mandat). Karena adanya hubungan keagenan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah, teori keagenan dapat diterapkan pada sektor publik yang sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Sebagai bagian dari peran mereka dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah federal dan memiliki kemandirian dalam menjalankan urusan mereka sendiri.

Karena dana perimbangan dimaksudkan untuk digunakan hanya oleh pemerintah daerah, maka

entitas-entitas ini juga berfungsi sebagai agen dalam mengelola dana tersebut. Anggota masyarakat harus bertanggung jawab dalam mengelola keuangan masyarakat karena dana tersebut merupakan uang publik yang dimaksudkan untuk kepentingan bersama dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Kurniati & Devi, 2022).

### **Desentralisasi Fiskal**

Bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan kebijakan publik dan layanan sesuai dengan jumlah bidang pemerintahan yang didelegasikan, desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran uang dari tingkat federal ke tingkat lokal.

Desentralisasi didefinisikan sebagai proses di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang diuraikan dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keseimbangan antara anggaran federal dan negara bagian adalah tujuannya. Desentralisasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana otoritas tertentu yang sebelumnya berada di tingkat federal, kini dilaksanakan di tingkat negara bagian dan daerah, jauh dari birokrasi yang terpusat. Gagasan desentralisasi fiskal adalah membiarkan berbagai daerah menangani keuangan mereka sendiri. Dengan mengesampingkan urusan agama, kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, serta moneter dan fiskal, model ini memberikan lebih banyak wewenang kepada daerah dalam sejumlah domain lainnya.

### **Otonomi Daerah**

Pasal 23 Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014 menetapkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah entitas politik atau wilayah dianggap otonom ketika ia mampu memenuhi tugasnya dalam batas-batas komunitas politik atau negara (Saragih, 2003). Alih-alih mendelegasikan kekuasaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ditugaskan pemerintah atau mengelola wilayah, konsep otonomi daerah menyoroti pilihan-pilihan politik yang dibuat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pembangunan, dan pemerintahan.

### *Flypaper Effect*

Salah satu konsekuensi dari pengeluaran adalah “flypaper effect”, yang terjadi ketika pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah bergantung pada dana federal daripada sumber daya mereka sendiri untuk menutupi biaya-biaya yang ada (Maimunah, 2006). Jika Anda ingin mengatasi

flypaper effect, Gordnichenko (2011) mengatakan bahwa Anda dapat membelanjakan lebih banyak uang atau mengumpulkan lebih banyak pajak dari pemerintah daerah. Pengeluaran, daripada pengumpulan pajak, tampaknya menjadi variabel yang paling terpengaruh oleh transfer.

## **Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua komitmen keuangan daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 33/2004. Semua fungsi pemerintahan yang diamanatkan atau diakui oleh provinsi, baik yang diwajibkan atau tidak, mendapatkan pendanaan daerah. Pengeluaran di setiap daerah dikelompokkan berdasarkan kategori, lembaga, dan tujuan. Suatu item dianggap sebagai belanja daerah jika berkontribusi pada pengurangan saldo anggaran lebih pemerintah yang tidak dapat dibayar kembali selama tahun anggaran yang bersangkutan, sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02.

## **Dana Alokasi Umum**

Halim (2016:127) menyatakan bahwa dana alokasi umum adalah “block grant” yang memungkinkan daerah untuk membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan daerah. Untuk menentukan alokasi DAU, APBN menentukan Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan minimal 26% sesuai dengan UU No. 33/2004. Distribusi dana umum berdasarkan bagi hasil ke daerah-daerah penghasil biasanya tidak merata karena kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah dipertimbangkan secara individual. Daerah-daerah dengan potensi pendapatan yang tinggi namun hanya membutuhkan sedikit bantuan resmi mungkin akan mendapatkan dana DAU yang lebih kecil. Alokasi DAU yang lebih besar dapat diberikan kepada daerah yang memiliki kebutuhan yang tinggi namun hanya memiliki sedikit dana. Sangat penting untuk mengevaluasi kemampuan APBD untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung total pendapatan APBD setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk masyarakat (Halim, 2009).

## **Dana Bagi Hasil**

Untuk mendukung kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 dan PP No. 55 tahun 2005, digunakan dana Bagi Hasil. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan dibagikan kepada daerah sesuai dengan jumlah tertentu. Bagi daerah yang menerima dana dari pemerintah pusat, seperti yang

berasal dari sumber daya alam atau dari pajak pusat seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana ini merupakan komponen penting dari dana perimbangan. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil diklasifikasikan menurut sifat pendapatan. Dana ini meliputi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak yang terkait dengan sumber daya alam.

## **Pendapatan Asli daerah**

Pendapatan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan Peraturan Daerah disebut sebagai PAD, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 18 UU No. 33 Tahun 2004. Dalam penyusunan APBD, perlu mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam kerangka desentralisasi, PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuannya.

## **3. METODOLOGI**

### **Sumber Data**

Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun 2019-2022, yang berfungsi sebagai sumber sekunder untuk penelitian ini. Data yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut diperoleh melalui prosedur pengeluaran data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

### **Populasi & Sampel Penelitian**

Sampel penelitian untuk studi ini terdiri dari 38 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel mencakup total dua puluh dua provinsi. Sampel data dipilih dengan menggunakan strategi pengambilan sampel yang disengaja sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan:

1. Provinsi-provinsi tersebut memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI.
2. Ketersediaan data seluruh variabel tahun anggaran 2019-2022.

### **Variabel Penelitian**

#### **Variabel Dependen**

Belanja daerah merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Belanja daerah mengacu pada setiap pengeluaran uang yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembangunan di dalam daerah dan untuk mengoperasikan pemerintahan.

#### **Variabel Independen**

#### **Dana Alokasi Umum**

Penelitian ini menggunakan DAU untuk menganalisis data distribusi dana tersebut ke provinsi-provinsi di Indonesia. Pendapatan dari APBN dialokasikan ke daerah-daerah otonom di Indonesia, yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota, melalui dana DAU. Tujuan dari dana-dana ini, yang merupakan komponen dari desentralisasi, adalah untuk menyamakan kedudukan sehingga berbagai daerah dapat memenuhi kebutuhan keuangan mereka sendiri.

**Dana Bagi Hasil**

Dalam kerangka desentralisasi, dana bagi hasil digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah. Pembayaran ini dialokasikan kepada daerah sesuai dengan persentase yang telah ditentukan, yang diambil dari pendapatan pemerintah.

**Pendapatan Asli Daerah**

Data mengenai PAD di Indonesia pada tingkat provinsi diperiksa dan dianalisis dalam penelitian ini. Istilah “pendapatan asli daerah” (PAD) menggambarkan dana yang berada di dalam suatu daerah tertentu.

**Teknik Analisis Data**

Data mengenai PAD di Indonesia pada tingkat provinsi diperiksa dan dianalisis dalam penelitian ini. Istilah “pendapatan asli daerah” (PAD) menggambarkan dana yang berada di dalam suatu daerah tertentu.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Statistik Deskriptif**

**Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Daerah	88	12.20	13.41	12.7196	.29011
DAU	88	815883641000	3212647484000	1564119016603.97	581216632966.346
DBH	88	12152404862	6329446113503	968801181564.98	1246710638424.242
PAD	88	345289254042	23249622293957	3471381485549.83	4386042672040.157
Valid N (listwise)	88				

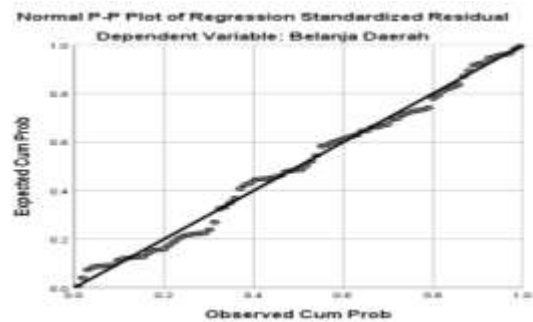
Sumber: Data Diolah, 2024

Dari apa yang dapat kita lihat pada Tabel 1, penelitian ini mengambil sampel dari 22 provinsi di Indonesia selama empat tahun. Secara keseluruhan, 88 objek (N) digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji deskriptif akan menunjukkan jumlah total tes yang dilakukan untuk setiap sampel sebagai N. Selain nilai terendah dan tertinggi yang diamati pada setiap sampel, tabel tersebut juga menunjukkan rata-rata dan standar deviasi untuk sampel dependen dan independen yang dianalisis.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel independen Dana Alokasi Umum dapat memiliki nilai antara 815.693.641.000 hingga 3.212.647.404.000, dengan rata-rata

1.564.119.016.803,97 dan standar deviasi 581.216.632.966,346. Dengan kisaran dari 13.152.404.952 hingga 6.329.446.113.503 pada Dana Bagi Hasil, dengan rata-rata 968.801.181.564,56 dan standar deviasi 1.249.719.630.424,242. Sementara itu, estimasi untuk variabel independen Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut: rata-rata = 3.471.391.485.549,83; standar deviasi = 4.356.042.872.040,157; minimum = 345.208.054.042; maksimum = 23.249.622.253.957. Kisaran nilai untuk variabel dependen, belanja daerah, adalah 12.20-13.41, dengan 12.7196 sebagai rata-rata dan 0.29011 sebagai standar deviasi.

**Uji Normalitas**



Sumber: Data Diolah, 2024

**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas**

Nilai-nilai yang tersisa mengikuti distribusi normal, karena semua titik pada Gambar 1 berada di sepanjang diagonal. Hal ini berarti kita dapat menggunakan model regresi tersebut untuk memprediksi belanja daerah dengan memperhitungkan dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah sebagai variabel independen.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.148	.084		224.377	.000		
	DAU	2.679E+13	.888	.577	7.488	.000	.638	1.567
	DBH	5.767E+14	.068	.248	3.898	.000	.816	1.226
	PAD	1.887E+14	.888	.283	3.858	.000	.552	1.818

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 2, variabel dana alokasi umum memiliki nilai tolerance sebesar 0,638 dan nilai VIF sebesar 1,567, seperti yang terlihat pada output coefficient. Variabel dana bagi hasil memiliki nilai tolerance sebesar 0,815 dan nilai VIF sebesar 1,226. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai tolerance sebesar 0,552 dan nilai VIF sebesar 1,810.

Hasil temuan uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah lebih tinggi dari 0,10 (10%), dan nilai VIF lebih rendah dari 10. Berdasarkan pengujian ini, tidak terjadi multikolinearitas. Pada akhirnya, temuan studi ini dapat digunakan untuk meramalkan belanja per daerah berdasarkan ketiga kriteria tersebut.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.849 <sup>a</sup>	.720	.710	.15612	1.730

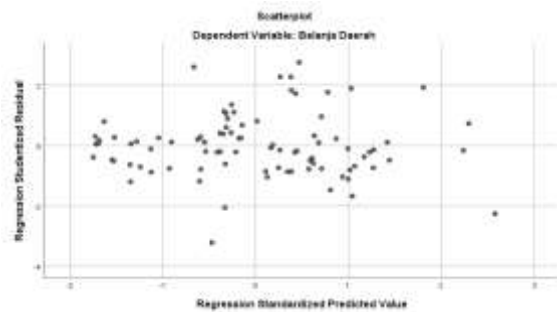
a. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data Diolah, 2024

Ringkasan model pada Tabel 3 memiliki nilai Durbin-Watson sebesar 1,730. Nilai dU dan dL masing-masing adalah 1,7244 dan 1,5836, seperti yang ditunjukkan pada tabel. Mengingat nilai dL lebih kecil dari DW dan berada dalam kisaran 4-dU (1,5836 < 1,730 < 2,2757), bersama dengan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi autokorelasi dalam penelitian ini.

**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data Diolah, 2024

**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Gambar 2 adalah grafik scatterplot yang menampilkan hasil uji heteroskedastisitas. Pada sumbu Y, titik-titik menyebar secara acak, dengan angka 0 di setiap sisi dari angka nol. Ketika ada heteroskedastisitas, hal ini memanifestasikan dirinya dalam pola seperti gelombang atau pola melebar dan menyempit secara teratur. Sebaliknya, jika titik-titik data terdistribusi secara merata di kedua sisi 0 pada sumbu Y dan tidak ada pola yang jelas, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Persamaan Regresi**

**Tabel 4. Hasil Persamaan Regresi**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
(Constant)	12.148	.054	224.377	.000			
DAU	2.879E-13	.000	.877	1.999	.000	.839	
DBH	5.767E-14	.000	.248	3.890	.000	.816	
PAD	1.887E-14	.000	.283	3.850	.000	.552	

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data Diolah, 2024

Tabel 4 menunjukkan data yang dibutuhkan untuk membangun beberapa model regresi linier yang menghubungkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil:

$$BD = \alpha + \beta_1 DAU + \beta_2 DBH + \beta_3 PAD + e$$

Keterangan:

- BD : Belanja Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DBH : Dana Bagi Hasil
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- $\alpha$  : konstanta
- $\beta$  : koefisien regresi
- e : error

Persamaan regresi linear berganda yang dapat dibuat berdasarkan tabel 4 adalah :

$$Y = 12.148 + 2.879X_1 + 5.767X_2 + 1.887X_3 + e$$

**Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mengukur seberapa baik model tersebut menjelaskan perubahan variabel dependen. Dari 0 hingga 1, ini adalah kisaran nilai R<sup>2</sup>. Daya penjas yang kurang memadai dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan oleh nilai R<sup>2</sup> yang rendah. Sebaliknya, jika nilai R<sup>2</sup> yang besar berarti variabel-variabel independen memberikan data yang cukup untuk meramalkan perubahan variabel dependen. Berikut ini adalah serangkaian angka yang mewakili hasil perhitungan R<sup>2</sup>:

**Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.849 <sup>a</sup>	.720	.710	.15612	1.730

a. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data Diolah, 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien determinasi, atau R Square, adalah 0,720. Dengan demikian, total alokasi, hasil panen, dan pendapatan asli daerah menyumbang 72% dari varians dalam variabel-variabel spesifik daerah. Faktor-faktor lain

yang tidak diperhitungkan oleh model regresi menyumbang 28% sisanya.

**Uji Statistik F**

Untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan, maka digunakan uji statistik F. Menurut kriteria uji F, model penelitian dianggap layak untuk diterapkan jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel atau nilai probabilitas (Sig) lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05). Sebaliknya, model penelitian dianggap tidak dapat diterapkan jika nilai probabilitas melebihi batas signifikansi (Sig>0,05) atau nilai F hitung lebih rendah dari nilai F tabel. Untuk mengestimasi variabel-variabel dependen, kami melakukan uji model regresi, dan hasilnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6. Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,275	3	1,758	72,146	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2,047	84	,024		
	Total	7,322	87			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah  
b. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAU

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil dari model regresi ditunjukkan pada Tabel 6, di mana nilai F sebesar 72,146 dan nilai p-value sebesar 0,000. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa model regresi dapat diterapkan pada penyelidikan ini. Semua pertimbangan yang relevan telah diperhitungkan dalam mencapai kesimpulan. Jelas bahwa H<sub>0</sub> diterima sedangkan H<sub>0</sub> ditolak karena Sig 0,000 < nilai alpha 0,05. Oleh karena itu, penggunaan model regresi dalam penelitian ini dapat dibenarkan.

**Uji Statistik T**

Untuk memverifikasi bahwa variabel independen memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen, peneliti menggunakan t-statistik untuk menguji hipotesis 1-3. Tabel berikut ini memberikan penjelasan mengenai temuan uji t.

**Tabel 7. Hasil Uji Statistik T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,148	,054		224,377	,000
	DAU	2,879E-13	,000	,577	7,988	,000
	DBH	5,767E-14	,000	,248	3,890	,000
	PAD	1,887E-14	,000	,283	3,650	,000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data Diolah, 2024

Variabel dana alokasi umum memiliki nilai t-value sebesar 7,988 pada tingkat signifikansi 0,000, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari alpha (0,000 < 0,05),

maka hipotesis pertama menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Pada tingkat signifikansi 0.000, nilai t-value untuk variabel dana bagi hasil adalah 3.890, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari alpha (0,000 < 0,05), maka dana bagi hasil memang memiliki dampak yang substansial terhadap belanja daerah, sesuai dengan hasil uji t dari hipotesis 2.

Tabel 7 lebih lanjut menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai t sebesar 3,650. Demikian pula, alpha (0,000 < 0,05) lebih kecil dari ambang batas signifikansi 0,000 untuk variabel pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah secara signifikan mempengaruhi belanja daerah, sesuai dengan temuan uji t untuk hipotesis 3.

**Pembahasan**

**Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah**

Dalam teori yang diungkapkan oleh Halim (2016), DAU berfungsi sebagai *block grant* yang memungkinkan daerah untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan daerah masing-masing. Dengan kata lain, DAU memberi fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan pengeluaran mereka berdasarkan prioritas pembangunan yang dianggap penting oleh daerah tersebut. Halim menjelaskan bahwa DAU adalah dana yang diberikan tanpa adanya ketentuan yang kaku mengenai bagaimana dana tersebut harus digunakan. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk memprioritaskan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan mereka, yang dalam konteks ini, mungkin berdampak langsung terhadap belanja daerah. Halim juga mengungkapkan bahwa distribusi DAU tidak selalu merata, karena alokasi ini mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah. Daerah yang memiliki kapasitas pendapatan yang tinggi, meskipun mungkin tidak memerlukan banyak bantuan DAU, akan tetap menerima dana tersebut, meskipun lebih kecil. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas pendapatan rendah namun dengan kebutuhan pembangunan yang tinggi akan menerima DAU lebih besar.

Dibandingkan dengan alpha (0,05), variabel dana alokasi umum memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 (0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Meskipun penelitian sebelumnya oleh (Amir et al., 2021) tidak menemukan adanya pengaruh pertumbuhan DAU terhadap belanja daerah di Provinsi Gorontalo, namun temuan ini sejalan dengan penelitian (Radjak & Latonang, 2021) yang menunjukkan adanya pengaruh tersebut.

## Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Variabel bagi hasil memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan lebih rendah dari alpha (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya yang tidak menemukan adanya hubungan antara pertumbuhan dana bagi hasil dengan belanja daerah (Helmi Melda & Efrizal Syofyan, 2020) dan sejalan dengan penelitian (Risqa Amalia & Al Muizzudin Fazaaloh, 2017).

## Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Dibandingkan dengan alpha (0,05), variabel pendapatan asli daerah memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel belanja daerah dengan variabel pendapatan asli daerah. Temuan penelitian ini mendukung temuan dari (Amir et al., 2021), yang menemukan bahwa ekspansi PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Namun penelitian sebelumnya (Radjak & Latonang, 2021) gagal menemukan hubungan antara PAD dan belanja daerah, sehingga temuan kami berlawanan dengan penelitian tersebut.

## Flypaper Effect

DAU dan DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan belanja daerah. Pemerintah daerah cenderung mengalokasikan tambahan dana transfer pusat untuk membiayai berbagai program dan kegiatan, sehingga meningkatkan total belanja daerah.

Fenomena *flypaper effect* menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup tinggi dari pemerintah daerah pada dana transfer pusat. Hal ini dapat menjadi kendala dalam mencapai otonomi daerah yang sebenarnya, karena daerah menjadi kurang berinisiatif untuk meningkatkan PAD.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Pemerintah pusat perlu merancang kebijakan yang mendorong peningkatan PAD, misalnya melalui reformasi pajak daerah, pengembangan sektor unggulan daerah, dan peningkatan efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam mengelola keuangan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memanfaatkan dana transfer pusat secara efektif dan efisien.

Dalam investigasi ini, fenomena *flypaper effect* dikonfirmasi dengan membandingkan koefisien DAU dan DBH dengan koefisien PAD, yang keduanya lebih dari 1,887.

Penelitian Melda dkk. (2020) mengkonfirmasi terjadinya fenomena *flypaper effect* dan memberikan kepercayaan terhadap hasil investigasi ini. Berbeda dengan kesimpulan penelitian ini,

penelitian (Otaviana, 2021) menyatakan bahwa *flypaper effect* tidak terjadi karena nilai koefisien PAD lebih besar dari nilai koefisien DAU.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 hingga tahun 2022, belanja daerah Provinsi Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh Dana Alokasi Umum.
2. Pada tahun 2019 hingga tahun 2022, Belanja Daerah Provinsi Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh Dana Bagi Hasil.
3. Pada tahun 2019 hingga tahun 2022, Belanja Daerah Provinsi Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh Pendapatan Asli Daerah.
4. Sejak tahun 2019 hingga 2022, terjadi *flypaper effect* terhadap belanja daerah di provinsi Indonesia.

### 5.2. Saran

Penulis menjelaskan temuan penelitian dan memberikan beberapa rekomendasi, termasuk agar pemerintah provinsi membuat rencana anggaran yang terintegrasi dan komprehensif yang memperhitungkan semua sumber pendapatan (DAU, DBH, dan PAD) dan mengalokasikan dana secara efektif berdasarkan prioritas pembangunan daerah; agar ada lebih banyak transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana DAU, DBH, dan PAD untuk mengurangi risiko *flypaper effect*; bahwa kapasitas institusi pemerintah provinsi dalam mengelola keuangan daerah, termasuk manajemen keuangan yang baik dan pengambilan keputusan yang berbasis data, dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana DAU, DBH, dan PAD; dan bahwa evaluasi dan pemantauan penggunaan dana DAU, DBH, dan PAD secara berkala untuk belanja daerah provinsi sangat penting. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau menggunakan faktor-faktor lain yang belum tercakup dalam penelitian ini, serta memperluas area analisis penelitian untuk menemukan isu-isu utama di daerah, seperti ukuran kota atau kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, W. R., Nor, W., & Nordiansyah, M. (2015). *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1-12.
- Agussalim, Mar'atus, & Sultan. (2022). Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*, Hlm. 1-17.

- Aprilla, Nila dan Redo Arian Saputra. 2013. Pengaruh *Flypaper Effect*, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. 3, (2), 107-13.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika (Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Iskandar, Irham. 2012. Flypaper Effect pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 13, Nomor 1. Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung.
- Kusumadewi, D. A dan A. Rahman. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* , 11 (1): 67-80.
- Listiorini. 2012. Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 4(2): 111-126.
- Maimunah, M. (2006). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Siagian, P. A. 2009. *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Vina. 2021. *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(4): 43-55.